

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar yang berada di Indonesia, bahkan Pulau Jawa merupakan pulau terbesar ke 13 di dunia dengan luas sekitar 129.400 km². Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi diantaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Jawa Timur sekaligus menjadi provinsi terbesar dalam ukuran luas wilayah di Pulau Jawa dengan luas wilayah sebesar 47.799,75 km², atau sekitar 36% dari luas Pulau Jawa. Berikut adalah peta Pulau Jawa:



Sumber: BNPB RI, 2019

GAMBAR 4.1.
Peta Pulau Jawa

Gambar 4.1 peta Pulau Jawa yang terdiri dari 6 provinsi memiliki batas masing-masing wilayah atau memiliki luas masing-masing wilayah provinsi

tersebut dan jumlah pulau-pulau yang ada di dalam provinsi. Tabel 4.1 merupakan tabel kondisi geografis Pulau Jawa:

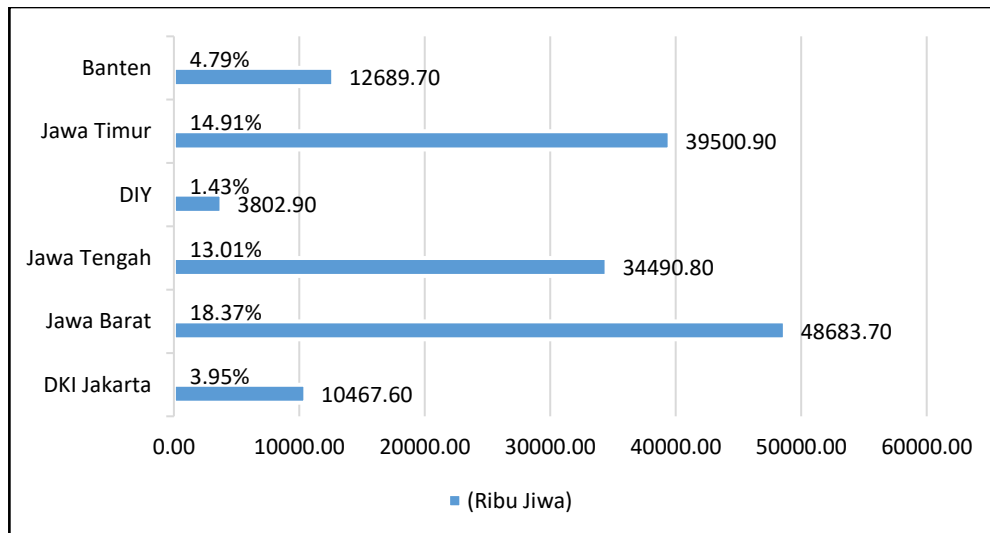
TABEL 4.1.
Kondisi Geografis Pulau Jawa

Provinsi	Ibu Kota	Luas (km ² /sq.km)	Jumlah Pulau	Persentase Terhadap Luas Indonesia
DKI Jakarta	Jakarta	664.01	110	0,03
Jawa Barat	Bandung	35,377.76	30	1,85
Jawa Tengah	Semarang	32,800.69	72	1,71
DIY	Yogyakarta	3,133.15	33	0,16
Jawa Timur	Surabaya	47,799.75	431	2,49
Banten	Serang	9,662.92	81	0,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 Pulau Jawa terdiri dari 6 provinsi dengan Ibu Kotanya masing-masing yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Luas wilayah yang dimiliki masing-masing provinsi berbeda, luas wilayah terbesar berada di Provinsi Jawa Timur yang setara dengan 2.49% terhadap luas Indonesia. Karakteristik penduduk di Pulau Jawa sangat beragam, dari mulai budaya dan bahasa. Adapun budaya yang sangat terkenal di manca Negara yaitu wayang kulit, keris, batik, dan juga alat musik seperti gamelan dan angklung. Bahasa Indonesia umumnya digunakan sebagai bahasa nasionalitas di Pulau Jawa, selain itu, Pulau Jawa juga memiliki beberapa bahasa daerah. Bahasa daerah yang biasa dipakai oleh masyarakat Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur umumnya bahasa Jawa, sedangkan bahasa yang dipakai oleh masyarakat Jawa barat yaitu bahasa sunda, dan bahasa betawi yang identik dengan masyarakat DKI Jakarta. Pulau

Jawa secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk sekitar 149,635.6 ribu jiwa atau sekitar 56.46% dari jumlah penduduk di Indonesia. Gambar 4.2 merupakan diagram yang menjelaskan jumlah penduduk di Pulau Jawa dan persentase terhadap jumlah penduduk Indonesia:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

GAMBAR 4.2.
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Jawa dan Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Indonesia

Satuan dalam Gambar 4.2 merupakan ribu jiwa, penduduk paling banyak berada pada Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 48,683.7 ribu jiwa yang setara dengan 18.37% dari total jumlah penduduk Indonesia. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terendah dibandingkan provinsi lainnya, dengan jumlah penduduk yang mencapai 3,802.9 ribu jiwa yang setara dengan 1.43% total penduduk Indonesia.

Indikator penting untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu salah satunya dengan melihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto). Adapun PDRB Perkapita yaitu memberikan

gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk yang bersangkutan. Laju pertumbuhan Berikut perkembangan PDRB Perkapita seluruh provinsi di Pulau Jawa tahun 2012-2018:

TABEL 4.2.
PDRB Perkapita Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2018 (Rupiah)

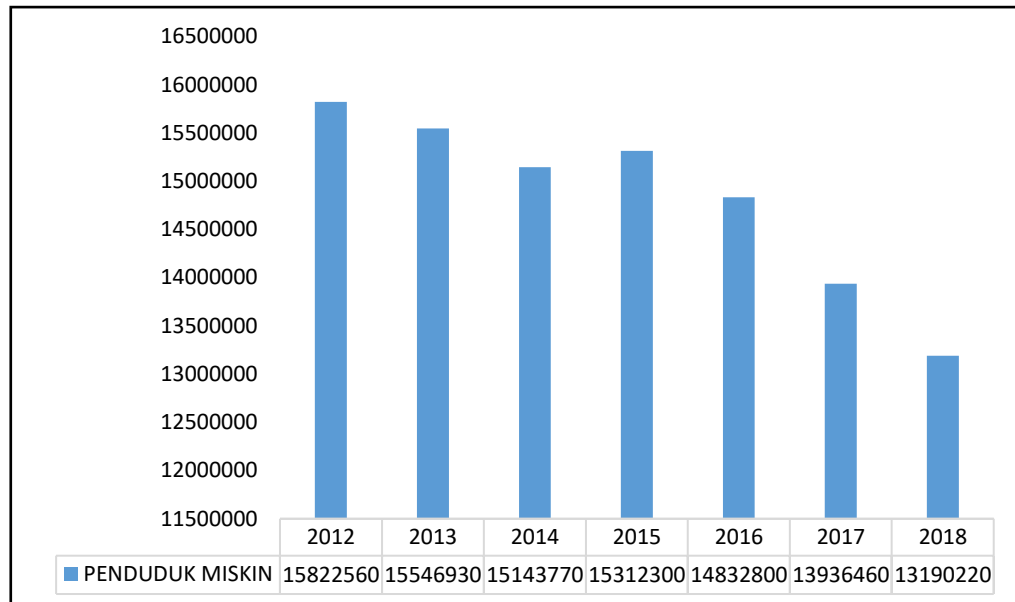
Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2012	123,962,380	23,036,000	20,950,620	20,183,880	29,508,400	27,716,470
2013	130,060,310	24,118,310	21,844,870	21,037,700	31,092,040	28,910,660
2014	136,312,340	24,966,860	22,819,160	21,867,900	32,703,390	29,846,640
2015	142,913,610	25,845,500	23,887,060	22,688,360	34,271,810	30,813,030
2016	149,831,930	26,923,510	24,959,490	23,565,680	35,970,780	31,781,560
2017	157,637,320	27,975,130	26,088,910	24,534,270	37,724,290	32,940,280
2018	165,863,310	29,161,390	27,290,820	25,776,980	39,587,920	34,191,750

Sumber: BPS, 2019

Selama Periode 2012-2018, PDRB Perkapita di Pulau Jawa mengalami kenaikan setiap tahunnya di masing-masing provinsi. Terlihat dalam gambar provinsi yang mempunyai nilai PDRB perkapita tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu di atas Rp.120.000.000 pertahunnya. Sedangkan provinsi dengan nilai terendah berada pada provinsi DI Yogyakarta, dengan nilai sebesar di atas Rp20.000.000 pertahunnya. Data PDRB Perkapita ini digunakan juga sebagai tingkat ukuran kemakmuran suatu daerah. Selain itu, dengan adanya data yang diperkirakan menjadi pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk dalam satu tahunnya, namun semua itu tidak terlepas dari adanya penduduk yang masih dalam kategori miskin atau dengan pendapatan yang masih dibawah rata-rata yang ditetapkan di setiap daerah masing-masing. Terlebih masyarakat di Pulau

Jawa umumnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, industri, dan jasa.

Berikut adalah jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa tahun 2012-2018:



Sumber: BPS, 2019 (data diolah)

GAMBAR 4.3.

Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2012-2018

Tertera di atas bahwa jumlah penduduk miskin yang berada di Pulau Jawa pada periode 2012-2018 cenderung mengalami penurunan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 mencapai 15 juta jiwa hingga tahun 2018 menurun mencapai 13 juta jiwa. Meski pada tahun 2015 sempat mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yang berada di angka 15.312.300 jiwa.

B. Profil Provinsi di Pulau Jawa

1. Provinsi DKI Jakarta.

DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia, yang terletak dibagian barat Jawa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan luas wilayah

provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Luas wilayah sebesar 664.01 km² atau setara dengan 0.03% dari jumlah luas di Indonesia, dengan jumlah pulau mencapai 110 pulau.



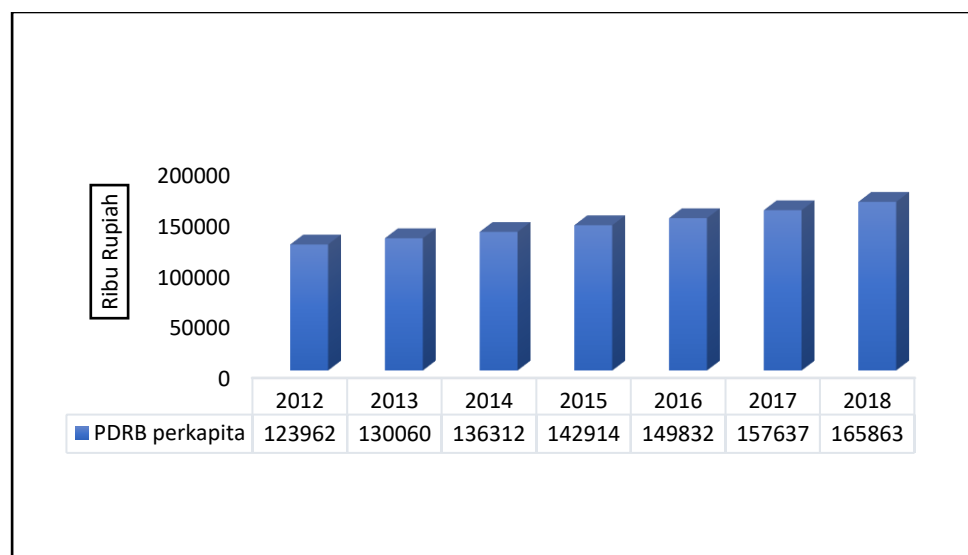
Sumber: BNPB RI, 2019

GAMBAR 4.4.
Peta Provinsi DKI Jakarta

Sebagai Ibu Kota Indonesia, Jakarta memiliki peran yang penting dalam proses keberlangsungan pemerintah Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan hampir dalam segala sektor hingga sebagai pusat perekonomian, Jakarta mempunyai daya tarik tersendiri baik untuk investor ataupun para tenaga kerja dari berbagai wilayah lainnya. Tingkat urbanisasi yang tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor mengakibatkan jumlah pendatang meningkat ke Provinsi Jakarta. DKI Jakarta sendiri terbagi menjadi 5 kota, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Terlebih, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang mencapai

10.467.600 jiwa, atau setara dengan 3.95% jumlah seluruh penduduk Indonesia dengan luas wilayah yang terkecil akan mengakibatkan wilayah ini menjadi semakin sempit. Wilayah Jakarta yang padat membuat beberapa kota disekitarnya menjadi kota yang hampir menyerupai Jakarta seperti yang sering disebut Kota Jabodetabek. Warga asli masyarakat Jakarta yaitu sering dikenal sebagai suku Betawi.

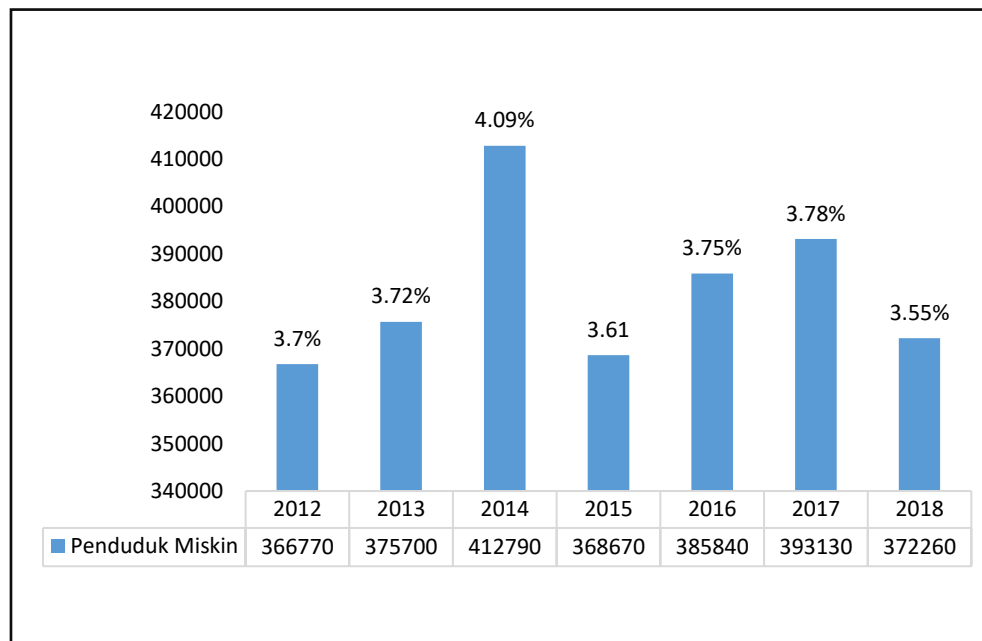
Sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang terjadi di sebuah daerah tiap tahunnya. Jika PDRB secara umum menggambarkan keadaan suatu daerah, maka jika dalam suatu daerah yang memberikan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di sebut sebagai PDRB Perkapita.



Sumber: BPS, 2019

GAMBAR 4.5.
PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2018 (Ribu Rupiah)

Gambar 4.5 menunjukkan perkembangan PBRD Perkapita yang dialami Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2012-2018. PDRB perkapita yang diterima penduduk DKI Jakarta periode 2012-2018 selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, hingga mencapai di atas Rp160.000.000 pada tahun 2018, tidak heran jika PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Tingginya nilai PDRB Perkapita tidak memungkiri masih banyak penduduk yang masih dalam kondisi miskin, yang artinya kesejahteraan masih belum dirasakan oleh semua kalangan.



Sumber: BPS, 2019

GAMBAR 4.6.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta
Tahun 2015-2018

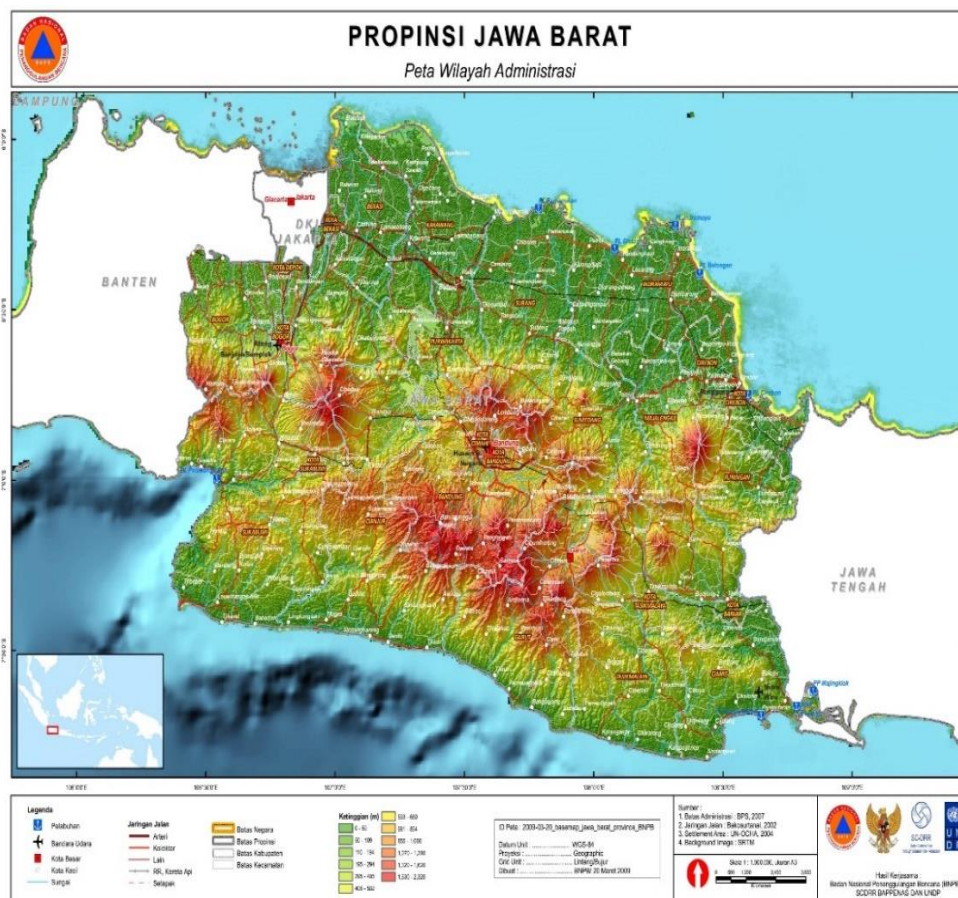
Gambar 4.6 menunjukkan data jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta serta persentasenya terhadap jumlah penduduk yang mengalami

fluktuasi. Jumlah penduduk miskin periode 2012-2014 cenderung mengalami kenaikan hingga mencapai 412.790 jiwa atau mencapai 4.09% dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Pada tahun 2015 penurunan jumlah penduduk miskin terjadi hingga mencapai 368.670 jiwa atau mencapai 3.61% dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Periode selanjutnya hingga 2017 jumlah penduduk miskin DKI Jakarta mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah penduduk miskin mencapai 372.260 jiwa, setara dengan 3.55% dari jumlah penduduk di DKI Jakarta tahun 2018.

2. Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah terbesar ke dua di Pulau Jawa dengan luas sekitar 35,377.76 km² dengan persentase terhadap jumlah luas wilayah Indonesia sebesar 1.85%, dan terdapat 30 pulau yang berada di

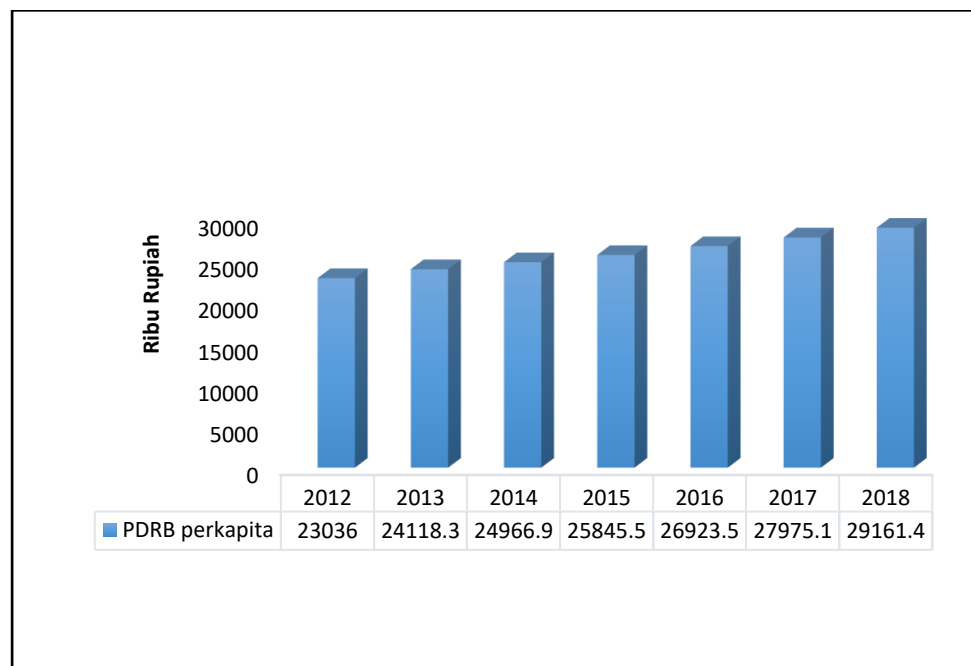
Provinsi Jawa Barat. Wilayah Jawa Barat berbatasan dengan provinsi DKI dan Juga provinsi Jawa Tengah. Total populasi yang berada di Jawa Barat mencapai 48.683.700 jiwa yang setara dengan 18.37% dari jumlah populasi di Indonesia, yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 Kota. Selain itu, Jawa Barat memiliki Kota besar yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat seperti Bandung sebagai Ibu Kota dan Kota Bogor, selain itu kawasan industri terbesar di Indonesia berada di Kabupaten Bekasi dan Karawang.



Sumber: BNPB RI, 2019

GAMBAR 4.7.
Peta Provinsi Jawa Barat

Ukuran kesejahteraan penduduk dan kondisi ekonomi yang bisa diukur melalui PDRB Perkapita, pertumbuhan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat tercantum pada gambar 4.8. Berdasarkan gambar 4.8 terlihat bahwa PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012-2018 mengalami peningkatan secara stabil, dengan besaran berkisar Rp23.000.000 sampai Rp29.000.000, artinya semakin membaik pula pendapatan yang dicapai oleh provinsi Jawa Barat, walaupun demikian, masih ada penduduk miskin yang masih mendapatkan pendapatan dibawah rata-rata atau garis kemiskinan.

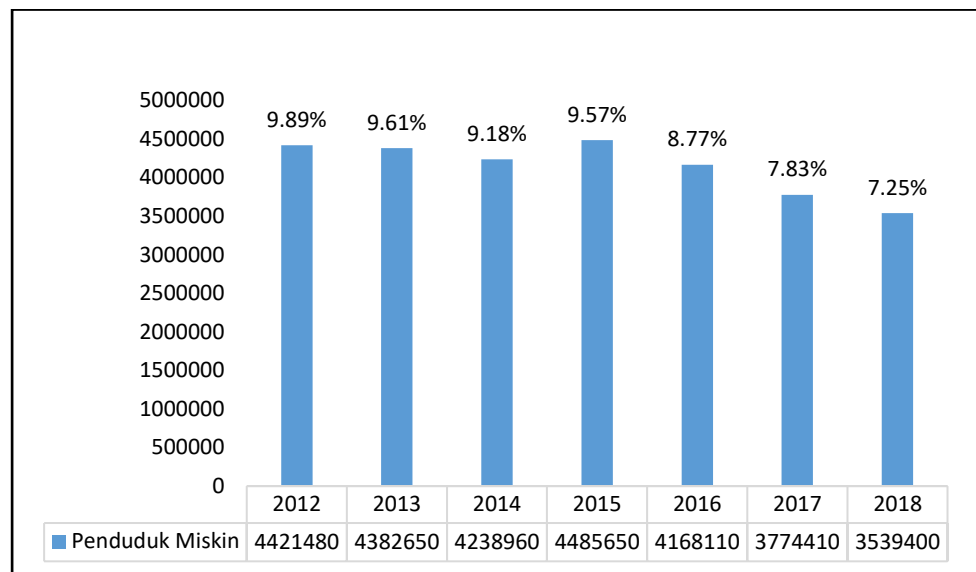


Sumber: BPS, 2019

GAMBAR 4.8.

PDRB Perkapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2018 (Ribuan Rupiah)

Gambar 4.9 menjelaskan bahwa pada periode 2012-2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi akan tetapi dari keseluruhan cenderung mengalami penurunan. Kondisi yang mengalami kenaikan terjadi pada tahun 2015 hingga mencapai 4.485.650 jiwa penduduk miskin atau setara dengan 9.57% jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat di tahun 2015. Akan tetapi untuk persentase tertinggi terjadi di tahun 2012 yaitu sebesar 9.89% dari jumlah penduduk di tahun 2012. Hingga tahun 2018 jumlah penduduk miskin berada pada kondisi yang paling rendah diantara tahun lainnya artinya jumlah penduduk miskin semakin berkurang, dengan jumlah 3.539.400 jiwa atau setara dengan 7.25% jumlah penduduk di Jawa Barat tahun 2018.



Sumber: BPS, 2019 (data diolah)

GAMBAR 4.9.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat
Tahun 2015-2018

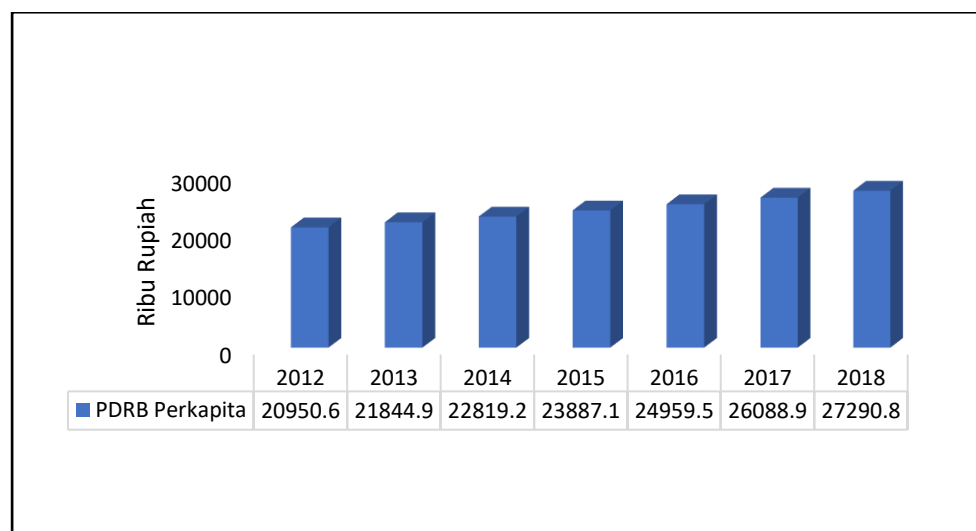
3. Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 32,800.69 km², setara dengan 1.71% jumlah luas Indonesia. Provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten, dengan Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah dan menjadi provinsi terbesar ke tiga di Pulau Jawa. Berdasarkan posisi geografis letak Jawa Tengah diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur dan juga berbatasan di bagian selatan dengan Provinsi DI Yogyakarta . Jarak yang terjauh dari barat ke Timur adalah 263 km sedangkan dari utara ke selatan mencapai 226 km. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 34.490.800 ribu jiwa, artinya jumlah penduduk di Jawa Tengah menyumbangkan sekitar 13.01% dari jumlah penduduk di Indonesia.



Sumber: BNPB RI, 2019

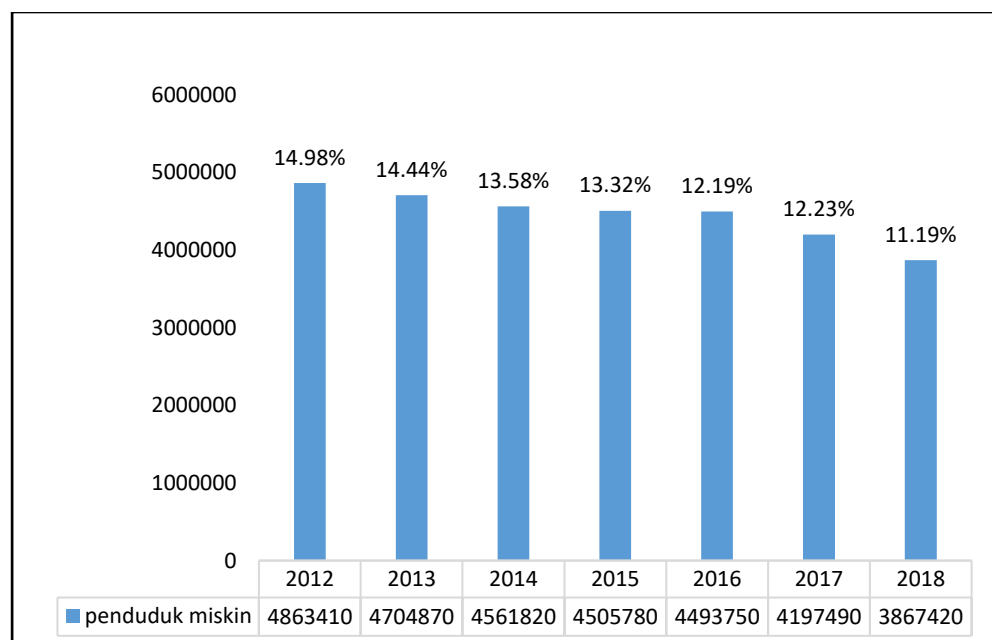
GAMBAR 4.10.
Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS, 2019

GAMBAR 4.11.
PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2018 (Ribu Rupiah)

Tertera pada gambar 4.11 bahwa PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah dengan satuan ribu rupiah, mengalami kenaikan dari periode 2012-2018 hingga pada tahun 2018 mencapai Rp27.790.820, arti dari kenaikan tersebut yaitu semakin membaik pendapatan yang diperoleh provinsi Jawa Tengah, walaupun demikian, masih ada penduduk miskin yang masih mendapatkan pendapatan dibawah rata-rata. Berikut data yang didapat melalui survei sosial nasional yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang digambarkan pada gambar 4.12. Berdasarkan gambar 4.12, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2012-2018. Walaupun dari sisi persentase laju dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan dari 12.19% menjadi 12.23% dari total penduduk di Provinsi Jawa Barat pada tahun tersebut.



Sumber: BPS, 2019

GAMBAR 4.12.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah
Tahun 2012-2018

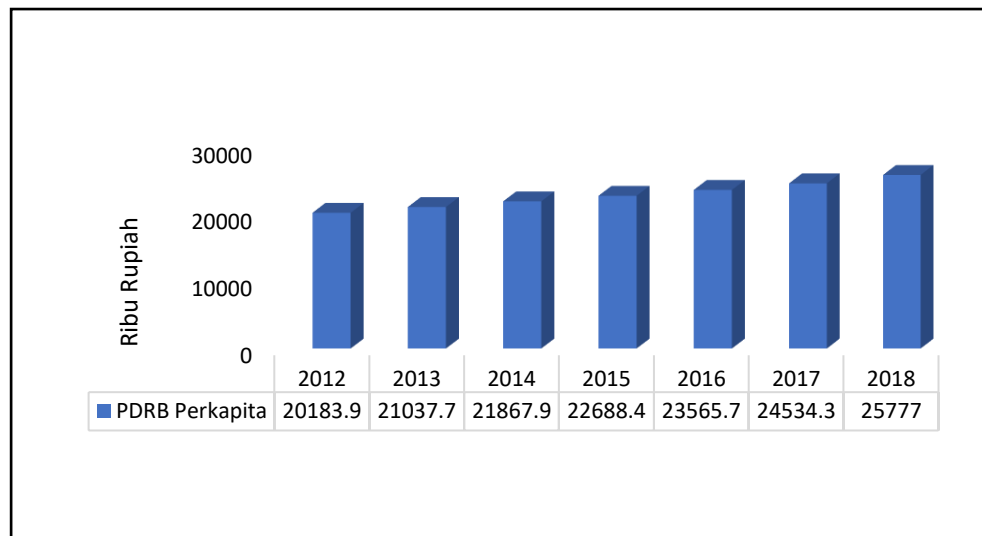
4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 3,133.15 km² setara dengan 1.43% luas Negara Indonesia, dan memiliki jumlah penduduk sekitar 3.802.900 jiwa yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota, antara lain Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Salah satu alasan Yogyakarta disebut Istimewa karena sistem pemerintahannya masih menggunakan sistem kerajaan. Meski tergolong sebagai provinsi dengan luas wilayah yang kecil, Provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama dengan predikat sebagai Kota budaya dan kota pelajar, sehingga memiliki pendatang yang cukup tinggi baik di sektor pendidikan maupun wisata. Hal ini menjadi salah satu sektor yang menjadi unggulan Provinsi Yogyakarta.



Sumber: BNPB RI, 2019

GAMBAR 4.13.
Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



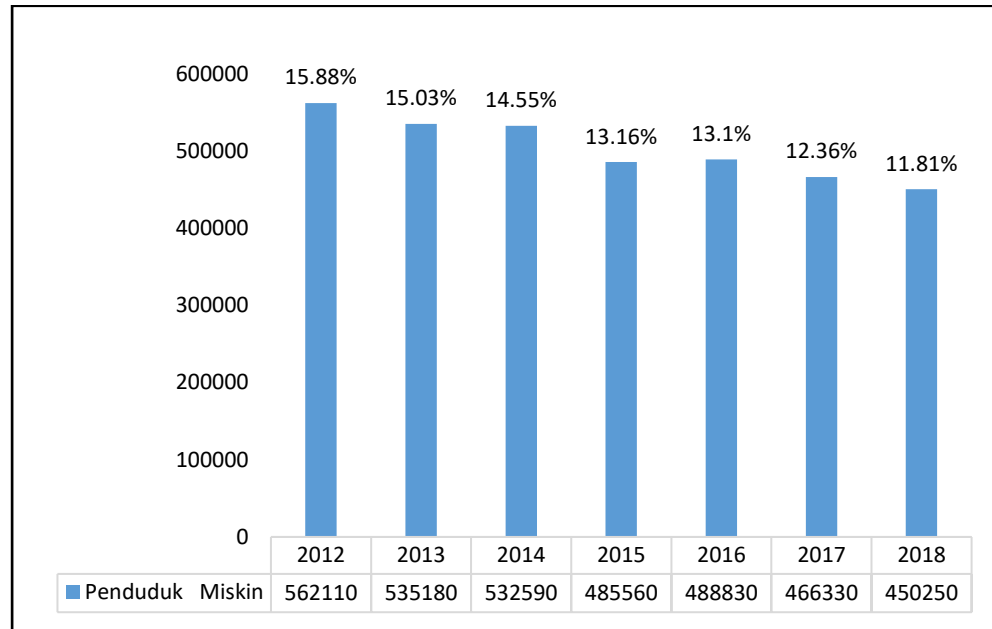
Sumber: BPS, 2019

GAMBAR 4.14.
PDRB Perkapita Provinsi DI Yogyakarta
Tahun 2012-2018 (Ribu Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai PDRB Perkapita provinsi DI Yogyakarta terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, terutama pada periode 2012-2018, hingga mencapai Rp25.776.980 di tahun 2018. Nilai PDRB Perkapita yang semakin meningkat tiap tahunnya, tidak bisa menutup kemungkinan masih ada penduduk yang menerima pendapatan dibawah rata-rata atau di bawah garis kemiskinan.

Gambar 4.15 menunjukkan data jumlah penduduk miskin yang berada di DI Yogyakarta dalam periode tahun 2012-2018. Penduduk miskin di DI Yogyakarta yang cenderung dari tahun ke tahun mengalami penurunan hingga pada tahun 2018 mencapai 450.250 jiwa atau setara dengan 11.81% dari keseluruhan jumlah penduduk DI Yogyakarta jika dibandingkan dengan

penduduk miskin pada tahun 2012 yang mencapai 562.110 jiwa yang setara dengan 15.88% dari jumlah penduduknya.



Sumber: BPS, 2019

GAMBAR 4.15.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DI Yogyakarta
Tahun 2015-2018

5. Provinsi Jawa Timur.

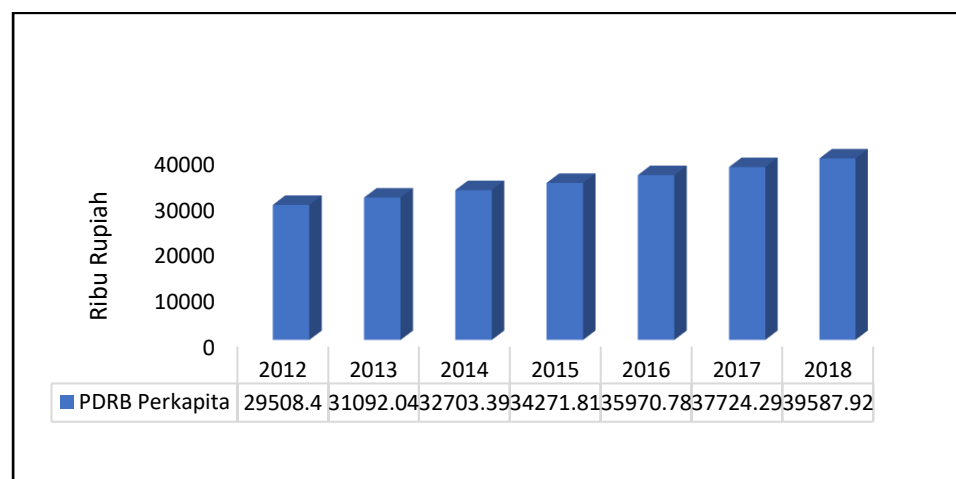
Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 47,799.75 km² merupakan provinsi dengan luas terbesar pertama di Pulau Jawa, jumlah tersebut merupakan 2.49% dari jumlah luas Indonesia. Secara umum, wilayah Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah dan Pulau Madura yang mencakup sisanya yaitu 10 persen. Batas daerah dibagian utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan Selatan, di sebelah timur berbatasan dengan perairan Samudera Hindia, sedangkan perbatasan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Populasi Provinsi Jawa Timur mencapai

sekitar 39.500.900 jiwa atau setara dengan 14.91% dari jumlah penduduk Indonesia, yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur.



Sumber: BNPB RI, 2019

GAMBAR 4.16.
Peta Provinsi Jawa Timur

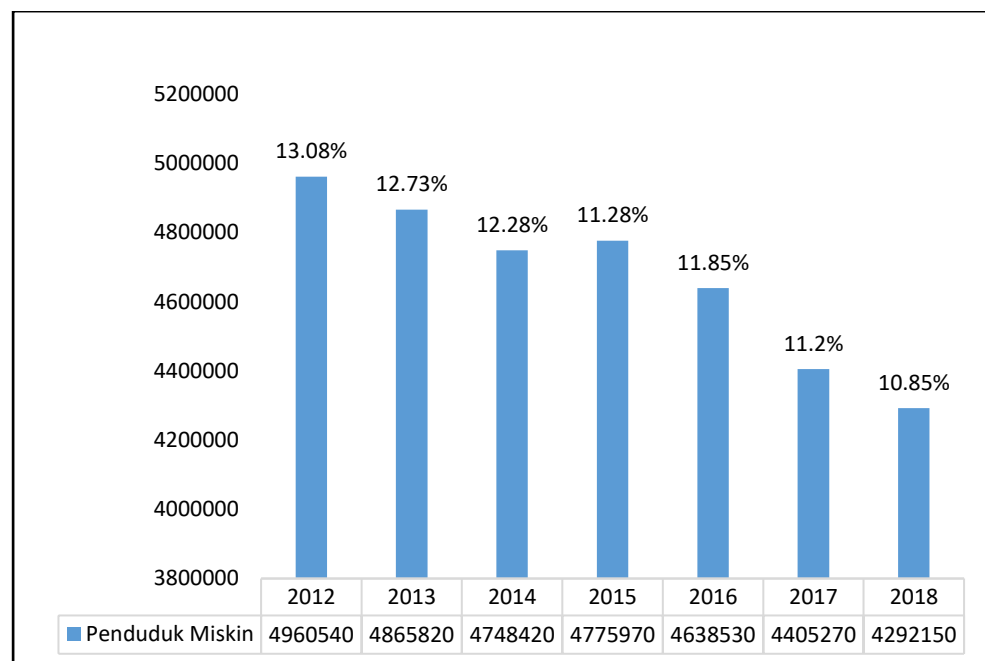


Sumber: BPS, 2019 (data diolah)

GAMBAR 4.17.
PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2018 (Ribuan Rupiah)

Dengan jumlah penduduk sebagai komponen dalam perhitungan, pemerintah bisa menentukan nilai PDRB Perkapita di daerah tersebut. Dalam periode 2012-2018 tercatat bahwa nilai PDRB Perkapita provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2018 mencapai Rp39.587.920, seperti yang terlihat pada gambar 4.17.

Dari banyaknya jumlah penduduk dan juga meningkatnya PDRB Perkapita di Provinsi Jawa Timur tidak dipungkiri masih ada penduduk miskin yang terdata melalui survei sosial nasioal dan dipublikasikan oleh badan pusat statistik, berikut data penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur:



Sumber: BPS, 2019 (data diolah)

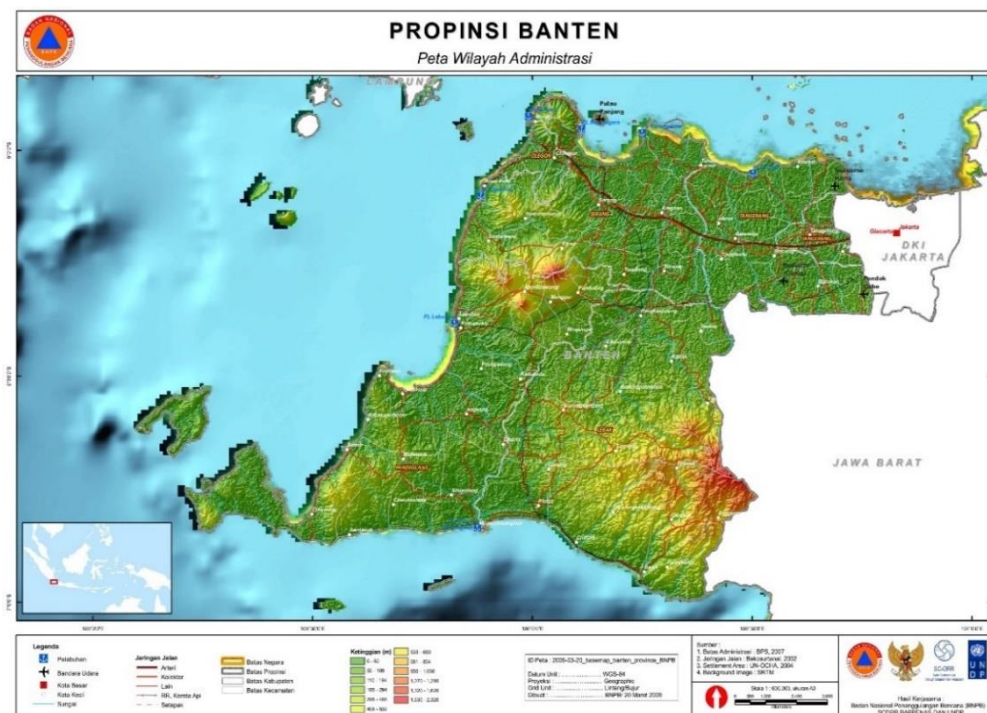
GAMBAR 4.18.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur
Tahun 2012-2018

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada periode 2012-2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan,

akan tetapi pada tahun 2015 cenderung meningkat dari sisi jumlahnya, namun pada persentase peningkatan terjadi pada tahun 2016. Jumlah terendah berada pada tahun 2018 yang mencapai 4.292.150 Jiwa penduduk miskin atau setara dengan 10.85% dari keseluruhan jumlah penduduk di Jawa Timur.

6. Provinsi Banten.

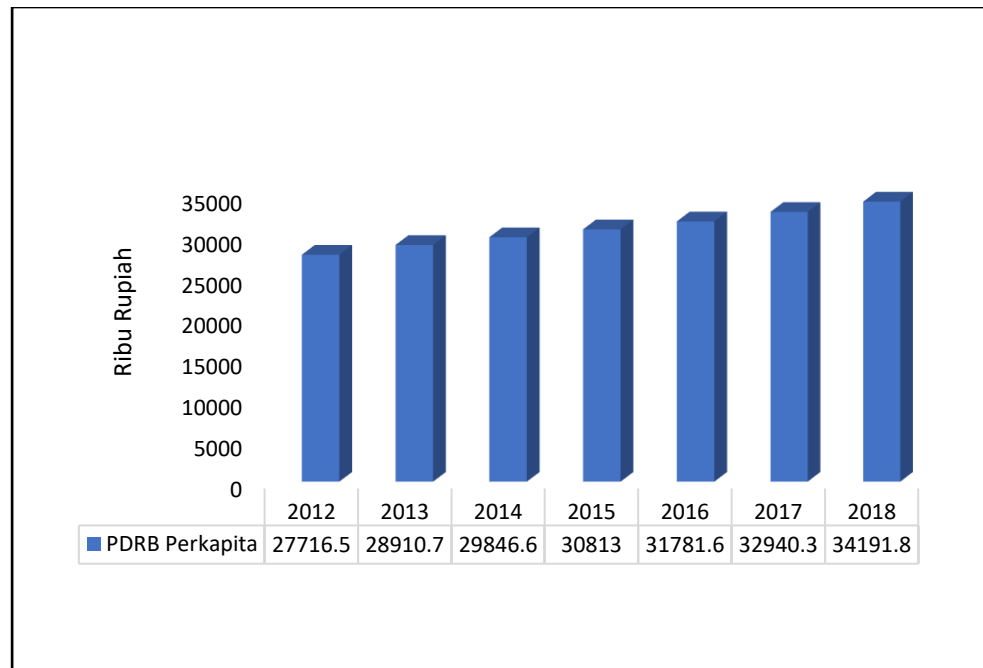
Secara geografis, Provinsi Banten merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa yang memiliki luas sebesar 9,662.92 km², dengan wilayah administrasi terdiri dari empat wilayah kabupaten dan kota diantaranya: Kabupaten Pandeglang (2.746 km²), Kabupaten Lebak (3.426 km²), Kabupaten Tangerang (1.011 km²), Kota Tangerang (153 km²), Kabupaten Serang (1.734 km²), Kota Cilegon (175 km²).



Sumber: BNPB RI, 2019

GAMBAR 4.19.
Peta Provinsi Banten

Wilayah Provinsi Banten berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Selat Sunda, menjadi posisi yang strategis dengan posisi pertemuan atau sebagai jalur penghubung anantara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

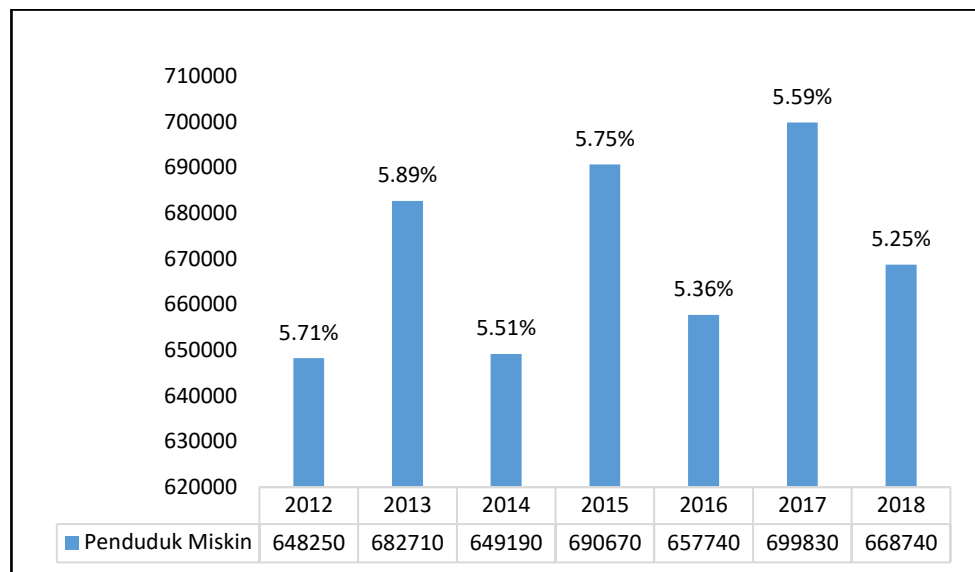


Sumber: BPS, 2019 (data diolah)

GAMBAR 4.20.

PDRB Perkapita Provinsi Banten Tahun 2012-2018 (Ribu Rupiah)

Tertera pada gambar di atas bahwa PDRB perkapita Provinsi Banten mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 mencapai Rp34.191.750. Walaupun demikian, masih ada penduduk miskin yang masih mendapatkan pendapatan dibawah rata-rata atau berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan setiap daerah. Berikut data yang didapat melalui survei sosial nasional yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik:



Sumber: BPS, 2019 (data diolah)

GAMBAR 4.21.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Banten
Tahun 2012-2018

Berdasarkan data yang tertera diatas, menunjukkan bahwa penduduk miskin yang berada di Provinsi Banten pada periode 2012-2018 mengalami fluktuasi yang berkisar antara 65 ribu jiwa keatas. Pada periode tersebut jumlah penduduk miskin terbesar berada pada tahun 2017 dengan jumlah 699.830 jiwa yang berkisar 5.59% dari keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Banten.

C. Gambaran Umum Variabel Operasional

1. Kondisi Ketimpangan Pendapatan.

Pulau Jawa sebagai pulau dengan penduduk hampir 50% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Taraf hidup penduduk pulau jawa bisa dikatakan tinggi, walaupun demikian masih terdapat angka kemiskinan didalamnya. Angka ketimpangan pendapatan pada 6 provinsi yang berada di

Pulau Jawa perhitungannya menggunakan Indeks Gini. Berikut adalah data ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa:

TABEL 4.3.
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2012-2018

Tahun	DKI	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2012	0.44	0.42	0.37	0.45	0.36	0.38
2013	0.40	0.41	0.39	0.42	0.37	0.38
2014	0.44	0.40	0.39	0.44	0.40	0.42
2015	0.42	0.43	0.38	0.42	0.40	0.39
2016	0.40	0.40	0.36	0.43	0.40	0.39
2017	0.41	0.39	0.37	0.44	0.42	0.38
2018	0.39	0.41	0.36	0.42	0.37	0.37

Sumber: BPS, 2019

Dari data di atas diketahui nilai ketimpangan pendapatan tertinggi ditempati oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata 0.42, dengan pertumbuhannya dari periode 2012-2018 mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 dan 2013 kondisi indeks gini mengalami penurunan sebanyak 0.03, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 0.02, kondisi seperti itu terjadi hingga 2018 yang mencapai 0.42, meskipun demikian angka tersebut masih tergolong sedang dalam ukuran ketimpangan pendapatan karena masih dibawah 0.5.

Nilai indeks gini pada Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2018 cenderung mengalami penurunan, terkecuali pertumbuhan pada tahun 2013 menuju 2014 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 0.44, angka tersebut sama dengan indeks gini pada tahun 2012. Selanjutnya hingga sampai

tahun 2018 cenderung menurun hingga mencapai angka 0.39. Pada tahun 2012-2014 nilai indeks gini provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cenderung menurun tiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali bahkan melampaui angka tahun-tahun sebelumnya dan menjadi nilai indeks gini terbesar selama periode 2012-2018 yaitu 0.43. Tahun 2016 dan 2017 menjadi pertumbuhan yang menurun dan cenderung rendah diantara tahun yang lainnya, pada periode akhir di 2018 indeks gini Jawa Barat meningkat 0.02 dari tahun sebelumnya dan angka tersebut menyerupai angka indeks gini pada tahun 2013 yaitu 0.41. Nilai indeks gini Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 mencapai 0.37 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 0.38, hingga tahun 2018 mengalami penurunan berkisar hanya 0.01 dengan nilai indeks gini tahun 2018 mencapai 0.36, angka tersebut identik dengan nilai indeks gini tahun 2016 yang merupakan nilai terendah selama periode 2012-2018. Nilai indeks gini periode 2012-2018 di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2012-2017, akan tetapi pada tahun 2014-2016 nilai indeks gini Jawa Timur stagnan di angka 0.40 berurut-urutan. Tahun 2018 menjadi tahun perubahan bagi indeks gini Jawa Timur karena mengalami penurunan mencapai 0.37. Indeks gini provinsi Banten periode 2012-2018 cenderung mengalami fluktuasi namun tidak begitu signifikan, pada tahun 2012 dan 2013 angka indeks gini berada pada angka 0.38 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 0.42, selanjutnya pada tahun 2015-2018 semakin menurun hingga mencapai 0.37.

2. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator perhitungan penting untuk mengukur dalam sebuah keberhasilan untuk upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga level bagi pembangunan suatu wilayah ataupun Negara. Dimensi dalam indeks pembangunan manusia meliputi: Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

TABEL 4.4.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2012-2018 (%)

Tahun	DKI	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2012	77.53	67.32	67.21	76.15	66.74	68.92
2013	78.08	68.25	68.02	76.44	67.55	69.47
2014	78.39	68.80	68.78	76.81	68.14	69.89
2015	78.99	69.50	69.49	77.59	68.95	70.27
2016	79.60	70.05	69.98	78.38	69.74	70.96
2017	80.06	70.69	70.52	78.89	70.27	71.42
2018	80.47	71.30	71.12	79.53	70.77	71.95

Sumber: BPS, 2019

Tabel 4.4 menjelaskan data perkembangan indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa periode 2012-2018, dari data tersebut terlihat bahwa indeks pembangunan manusia di setiap tahunnya mengalami kenaikan di semua provinsi di Pulau Jawa. Nilai indeks pembangunan tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta yang hingga tahun 2018 mencapai 80.47%, dimana semakin tinggi nilai IPM atau semakin mendekati angka 100% maka IPM dianggap sempurna, yang artinya keberhasilan yang tinggi dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga level bagi pembangunan suatu

daerah. Indeks pembangunan manusia yang yang rendah berada di Jawa Timur dibandingkan provinsi lainnya yaitu sebesar 70.77% pada tahun 2018.

Rata-rata yang dimiliki masing-masing Provinsi di Pulau Jawa pada periode 2012-2018 memiliki perbedaan, Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rata-rata IPM dengan angka 79.01%, Provinsi Jawa Barat mencapai 69.41%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 69.30%, Provinsi DIY dengan rata-rata IPM 77.68%, Jawa Timur sebesar 68.88% angka yang rendah diantara provinsi lainnya, sedangkan pada Provinsi Banten dengan rata-rata IPM 70.41%.

3. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan, nilai Tingkat Pengangguran Terbuka yakni menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Perhitungan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 100 persen.

Kondisi pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tingkat pengangguran terbuka yang tersebar berbagai Provinsi di Pulau Jawa. Angka tingkat pengangguran tertinggi secara keseluruhan tertinggi ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata 9% Nilai terendah berada di Provinsi DI Yogyakarta, namun tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya di semua provinsi. Dalam periode waktu tertentu masih ada peningkatan pengangguran terbuka seperti pada tahun 2013 dan 2015 di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Banten.

TABEL 4.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2012-2018 (%)

Tahun	DKI	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2012	9.67	9.08	5.61	3.90	4.11	9.94
2013	8.63	9.16	6.01	3.24	4.30	9.54
2014	8.47	8.45	5.68	3.33	4.19	9.07
2015	7.23	8.72	4.99	4.07	4.47	9.55
2016	6.12	8.89	4.63	2.72	4.21	8.92
2017	7.14	8.22	4.57	3.02	4.00	9.28
2018	6.24	8.17	4.51	3.35	3.99	8.52

Sumber: BPS, 2019

Semakin tinggi angka tingkat pengangguran terbuka maka artinya semakin tinggi pula pengangguran yang ada di daerah tersebut. Rata-rata yang dimiliki oleh semua provinsi di Pulau Jawa pada periode 2012-2018 sangatlah berbeda, terlebih tiga provinsi yang memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi dibandingkan dengan tiga provinsi lainnya, rata-rata TPT di Provinsi DKI Jakarta mencapai 7.64%, Provinsi Jawa Barat mencapai 8.67% dan Provinsi Banten mencapai 9.26% artinya Provinsi Banten memiliki nilai TPT tertinggi artinya kondisi pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten cukup tinggi. Tiga provinsi lainnya yang memiliki rata-rata cukup rendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata mencapai 5.14%, Provinsi DIY mencapai 3.37% dan pada Provinsi Jawa Timur yang hanya mencapai 4.1%.

4. Kondisi Penanaman Modal Asing.

Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu sebuah kegiatan penanaman modal untuk melakukan suatu usaha di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dari pihak asing. Data pada tabel 4.6 merupakan data realisasi penanaman modal asing di Pulau Jawa. Nilai realisasi penanaman modal asing yang masuk di Pulau Jawa dengan satuan Ribu US\$ banyak mengalami fluktuasi di masing-masing provinsi. Nilai tersebut tidak terlepas dari sektor apa saja yang masuk kedalamnya.

TABEL 4.6.
Penanaman Modal Asing Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2012-2018 (Ribu US\$)

Tahun	DKI	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2012	4,107,700	4,210,700	241,500	84,900	2,298,800	2,716,300
2013	2,591,100	7,124,900	464,300	29,560	3,396,300	3,720,200
2014	4,509,400	6,561,900	463,400	64,900	1,802,500	2,034,600
2015	3,619,400	5,738,700	850,400	89,100	2,593,400	2,542,000
2016	3,398,200	5,470,900	1,030,800	19,600	1,941,000	2,912,100
2017	4,595,000	5,142,900	2,372,500	36,500	1,566,700	3,047,500
2018	4,857,730	5,573,520	2,372,700	81,340	1,333,380	2,827,280

Sumber: BPS & BKPM, 2019 (data diolah)

Dari keseluruhan kondisi penanaman modal asing di Pulau Jawa, Jawa Barat merupakan provinsi yang mendapatkan investasi asing terbesar diantara provinsi lainnya. Sedangkan realisasi penanaman modal asing terendah ada di Provinsi DI Yogyakarta, bahkan nilai penanaman modal asing di DI Yogyakarta tidak lebih dari 37% dari total investasi yang ada di DIY.

Secara individu provinsi DKI Jakarta memiliki nilai investasi asing yang cukup tinggi, diketahui bahwa pada tahun 2012-2018 nilai investasi asing yang masuk mengalami kenaikan juga penurunan dalam tahun tertentu. Tahun 2012 nilai investasi yang masuk mencapai 4.1 Milyar US\$, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan hampir setengah dari nilai investasi asing tahun 2012 yaitu hanya mencapai 2.5 Milyar US\$, Pada tahun 2014 kenaikan terjadi bahkan nilai investasinya melebihi dari nilai investasi di tahun 2012 yaitu mencapai 4.5 Milyar US\$, tahun 2015 dan 2016 menjadi tahun dengan nilai investasi yang pertumbuhannya negative atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2014, namun setelah itu tahun 2017 dan 2018 menjadi sebuah titik balik masuknya investasi asing ke Provinsi DKI Jakarta karena di tahun tersebut nilai investasi mengalami kenaikan hingga mencapai 4.8 Milyar US\$, dengan demikian nilai investasi tahun 2018 menjadi nilai investasi asing terbesar yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Tertera di atas bahwa secara keseluruhan nilai investasi asing yang masuk di Provinsi Jawa Barat menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena banyaknya perusahaan yang terletak di beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat terlebih lagi Kabupaten di Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten. Kondisi PMA yang terjadi di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2018 mengalami fluktuasi, tahun 2013 menjadi puncak investasi asing yang masuk ke Provinsi Jawa Barat mencapai 7.1 Milyar US\$, karena mengalami fluktuasi sehingga pada tahun 2018 investasi asing yang masuk hanya

mencapai 5.5 Milyar US\$. Provinsi Jawa Tengah termasuk yang stabil dalam hal masuknya investasi asing. Terlihat kenaikan dari periode 2012-2018 semakin meningkat, terkecuali pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan. Kenaikan serta penurunan PMA di Provinsi DI Yogyakarta periode 2012-2018 dirasa sangat drastis pertumbuhannya, terlihat pada tahun 2012 ke 2013 nilai investasi asing yang tadinya mencapai sekitar 84 juta US\$ mengalami penurunan hingga mencapai 29 juta US\$. Tahun 2014 dan 2015 PMA mengalami kenaikan, hingga tahun 2016 mengalami penurunan kembali mencapai 19 juta US\$ dan menjadi nilai investasi terendah pada periode tersebut. Tahun berikutnya nilai investasi asing yang masuk ke Provinsi DI Yogyakarta mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 mencapai 81 juta US\$. Nilai investasi asing yang masuk di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi pada periode 2012-2018, hingga pada akhirnya di tahun 2018 nilai investasi asing yang masuk hanya mencapai 1.3 Milyar US\$, angka tersebut merupakan nilai investasi terendah selama periode 2012-2018, sedangkan nilai investasi tertinggi yang masuk berada pada tahun 2013 yaitu mencapai 3.3 Milyar US\$. Kondisi PMA di Provinsi Banten cukup stabil walaupun terdapat fluktuasi selama periode 2012-2018, hingga pada tahun 2018 investasi asing yang masuk mencapai 2.8 Milyar US\$.

5. Kondisi Derajat Desentralisasi Fiskal.

Derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan cara menggunakan rasio pendapatan asli daerah yang dibagi dengan total penerimaan daerah lalu dikalikan dengan 100. Derajat desentralisasi ini sebagai alat ukur kondisi

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka mengelola kemampuan fiskal di daerah tersebut dari sisi penerimaan. Selain itu, angka derajat desentralisasi fiskal juga mengukur tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Hasil dari perhitungan nilai desentralisasi fiskal di Pulau Jawa ditunjukkan melalui tabel dibawah ini:

TABEL 4.7.
Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Di Pulau Jawa
Tahun 2012-2018 (%)

Tahun	DKI	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2012	62.30	59.15	56.69	46.23	62.57	62.73
2013	67.95	64.25	61.55	47.08	66.75	66.11
2014	71.36	67.40	65.42	46.65	69.53	69.31
2015	76.20	66.78	64.80	46.86	69.29	67.86
2016	68.58	61.54	58.79	42.93	63.37	63.11
2017	67.72	56.22	52.94	36.42	58.01	59.31
2018	67.50	55.02	53.23	33.46	54.01	59.66

Sumber: BPS, 2019 (data diolah)

Data di atas menjelaskan kondisi derajat desentralisasi fiskal di Pulau Jawa tahun 2012-2018. Hasil yang didapat bahwa kemampuan provinsi di Pulau Jawa sudah sangat baik dengan angka diatas 50%, walaupun mengalami fluktuasi, DKI Jakarta memiliki nilai derajat desentralisasi fiskal diatas 60% bahkan ditahun 2014 dan 2015 mencapai angka 70%. Sama halnya pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 2014 dan 2015 derajat desentralisasi fiskal mencapai angka diatas 60%, dianggap menjadi nilai terbesar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, walaupun pada akhir periode tahun 2018 nilai derajat desentralisasi fiskal di Jawa Barat

mengalami penurunan dan mencapai angka terendah yang dimiliki yaitu sebesar 55.02%, sedangkan di Jawa Tengah nilai pada akhir periode mencapai 53.23%. Kondisi derajat desentralisasi fiskal Provinsi DI Yogyakarta periode 2012-2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang terhitung tidak terlalu mencolok atau stabil pada tahun 2012 sampai 2015, setelah itu pertumbuhan dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan secara terus menerus hingga pada tahun 2018 mencapai angka 33.46%. Kondisi derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Timur bahkan dari tahun 2015 sampai 2018 nilainya cenderung terus menurun mencapai 54.01%, walaupun pada awal periode tahun 2012 sampai 2014 nilai derajat desentralisasi fiskal mengalami pertumbuhan yang meningkat. Sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur di Provinsi Banten tahun 2012-2014 nilai derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2015 sampai 2017 pertumbuhannya mengalami penurunan, namun di akhir periode tahun 2018 sedikit mengalami kenaikan mencapai 59.66%.